

## Accounting Treatment of Goods and Services Expenditures at the Tondano District Court

Injilly Sefanya Karyn Rembet<sup>1\*</sup>, David P. E. Saerang<sup>2</sup>, Heince R. N. Wokas<sup>3</sup>  
Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Injilly Sefanya Karyn Rembet

[Injillyrembet064@student.unsrat.ac.id](mailto:Injillyrembet064@student.unsrat.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Accounting Treatment, Procurement of Goods and Services, Government Accounting Standards (SAP)

*Received :* 16, July

*Revised :* 18, August

*Accepted:* 20, September

©2025 Rembet, Saerang, Wokas:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The accounting treatment refers to the rules and steps taken in the accounting process, including the identification, quantification, and reporting of financial information in financial statements, whether for companies or government entities. The success of budgeting is typically assessed through the preparation of a Budget Realization Report (LRA). The origins, distribution, and use of financial resources under the control of the national or local government are summarized in this report, which also shows how the budget and actual realizations within a certain reporting period differ. The purpose of this research is to determine if the accounting treatment in the Budget Realization Report of the Tondano District Court complies with Government Regulation No. 71 of 2010's Government Accounting Standards (SAP).

---

## Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Jasa pada Pengadilan Negeri Tondano

Injilly Sefanya Karyn Rembet<sup>1\*</sup>, David P. E. Saerang<sup>2</sup>, Heince R. N. Wokas<sup>3</sup>  
Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Injilly Sefanya Karyn Rembet

[Injillyrembet064@student.unsrat.ac.id](mailto:Injillyrembet064@student.unsrat.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Perlakuan Akuntansi, Pengadaan Barang dan Jasa, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

*Received :* 16, Juli

*Revised :* 18, Agustus

*Accepted:* 20, September

©2025 Rembet, Saerang, Wokas:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Perlakuan akuntansi merujuk pada aturan dan langkah-langkah yang diambil dalam proses akuntansi, termasuk identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan dalam laporan keuangan, baik untuk perusahaan maupun entitas pemerintah. Kesuksesan penyusunan anggaran biasanya dievaluasi melalui penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Asal-usul, distribusi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang berada di bawah kendali pemerintah nasional atau lokal dirangkum dalam laporan ini, yang juga menunjukkan perbedaan antara anggaran dan realisasi aktual dalam periode pelaporan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah perlakuan akuntansi dalam Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Distrik Tondano sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

---

## PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan saat ini sedang berkembang pesat (Burhanudin Yusuf, 2015). Tujuan utama akuntansi pemerintahan adalah mencatat dan melaporkan transaksi yang dilakukan di lingkungan pemerintahan dengan akurasi dan ketepatan. Tuntutan akan Akuntansi pemerintahan sangat diperlukan saat ini karena akuntansi pemerintahan sangat akuntabel dan transparan dalam hal pencatatan transaksi dan pelaporan kinerja pemerintahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Sari & Baku, 2022). Belanja barang dan jasa merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah guna penerapan good governance dan reformasi birokrasi maka perlakuan akuntansi yang tepat akan menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara (Albab, 2020; Utami, 2017). Selain itu perlakuan akuntansi yang tepat menjadikan informasi tersebut memiliki kualitas relevansi bagi pimpinan satuan kerja dalam pengambilan Keputusan strategis dan operasional.

Perlakuan akuntansi yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan teknis dalam praktiknya masih mengalami masalah inkonsistensi pencatatan, pengakuan dan pelaporan belanja dan jasa (Febrianka, 2023; Harahap & Nasution, 2022). Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi regulasi pemerintah yaitu perlakuan akuntansi belanja barang dan jasa pada Pengadilan Negeri Tondano, sehingga bisa berkontribusi dalam mendukung efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan dan mendukung penerapan SAP. Pengadilan Negeri Tondano berperan sebagai lembaga peradilan yang melayani masyarakat, dengan menggunakan anggaran belanja dari APBN untuk menjalankan tugas dan operasional kantor. Hal penting untuk mengkaji efektivitas dan efisiensi realisasi belanja serta memberikan masukan untuk perencanaan anggaran yang lebih realistis. Penelitian tentang perlakuan akuntansi belanja barang dan jasa dilingkup peradilan negeri masih terbatas, dengan penelitian ini bisa diperoleh gambaran dan karakteristik pengelolaan anggaran di Pengadilan Negeri (Karmila et al., 2021; Kojongian et al., 2018).

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Perlakuan Akuntansi*

Perlakuan akuntansi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/Tahun 2022 mengatur akuntansi pengeluaran pemerintah pusat (Syaiful, 2006).

### *Pengakuan*

Pengeluaran biasanya diakui saat pembayaran diakui oleh Rekening Kas Umum Negara atau dengan persetujuan dari Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara. Pengembalian belanja atas anggaran tahunan sebelumnya dianggap sebagai pendapatan lain-lain, sedangkan belanja tahun anggaran berjalan dikurangi dengan pengembalian belanja atas tahun anggaran berjalan. (LRA) (Anwar et al., 2023).

### ***Pengukuran***

Biaya dihitung dengan asas bruto dari nilai nominal yang sesuai dengan SPM/SP2D, dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan, atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara (Anwar et al., 2023).

### ***Penyajian dan Pengungkapan***

Belanja ditampilkan dan dijelaskan dalam:

- a. Laporan tentang Realisasi Anggaran sebagai Belanja Negara.
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi.
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi.
- d. Catatan atas Laporan Keuangan untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

### ***Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)***

Menurut Akuntansi Belanja pada Peraturan Pemerintah tahun 2010 nomor 71, PSAP Akuntansi Belanja diakui saat pengeluaran dibuat dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah. Khususnya, jika pengeluaran dilakukan dari rekening bendahara, pengakuannya terjadi saat unit yang memiliki fungsi perbendaharaan menyetujui pertanggungjawaban pengeluaran tersebut. Peraturan hukum yang mengatur organisasi layanan umum digunakan untuk mengakui belanja dalam hal badan layanan umum. Belanja dikategorikan berdasarkan jenis, organisasi, dan fungsi. (Yusuf, 2015).

Pengelompokan pengeluaran berdasarkan jenisnya dikenal sebagai klasifikasi ekonomi untuk melakukan sesuatu. Belanja pemerintah pusat dikategorikan berdasarkan jenis ekonomi, termasuk belanja pegawai, barang, modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lainnya. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga (Baso et al., 2020).

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam anggaran untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang memiliki keuntungan selama lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk membeli tanah, struktur, bangunan, peralatan, dan aset yang tidak dapat diakses. Anggaran yang dialokasikan untuk tujuan yang tidak biasa dan tidak diharapkan, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, serta pengeluaran tambahan yang tidak terduga dan sangat diperlukan untuk menggerakkan fungsi pemerintah pusat dan daerah, dikenal sebagai belanja lain-lain atau tak terduga.

"Transfer keluar" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transfer uang antara entitas pelaporan. Misalnya, dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Klasifikasi berdasarkan organisasi mengacu pada unit organisasi pengguna anggaran. Di pemerintah pusat, pengeluaran dikategorikan menurut organisasi, termasuk kementerian, lembaga, dan unit organisasi yang berada di bawahnya. Pengeluaran pemerintah daerah dapat dikategorikan berdasarkan organisasinya, seperti Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Pemerintah Daerah, Dinas Pemerintah Tingkat Tinggi, dan Lembaga Teknis. Klasifikasi dilakukan berdasarkan fungsi, yaitu berdasarkan bagaimana pemerintah pusat dan daerah melayani masyarakat.

Dalam dokumen anggaran, realisasi anggaran belanja diklasifikasikan. Penurunan belanja, atau pengembalian belanja, dicatat sebagai pengurangan belanja selama periode yang sama. Belanja yang dikoreksi dicatat dalam pendapatan LRA dalam pos lain untuk pendapatan LRA jika diterima pada periode berikutnya. Selain untuk memenuhi persyaratan pertanggungjawaban, akuntansi belanja juga dapat dibuat untuk kebutuhan kontrol manajemen untuk mengukur seberapa efektif dan efisien pengeluaran mereka.

### ***Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)***

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat oleh pemerintah Indonesia. APBN mencakup daftar yang terorganisir dan rinci berisi perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu setahun anggaran, dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 2010 No. 71, laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu laporan keuangan yang setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan badan lainnya yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Putri, 2021).

Menurut UU 17/2003, pengakuan dan pengukuran berdasarkan akrual dimaksud didefinisikan sebagai berikut :

- a. Hak pemerintah pusat dianggap sebagai penambah tingkat kekayaan bersih dikenal sebagai pendapatan negara.
- b. Pendapatan negara adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hak pemerintah pusat yang dianggap meningkatkan nilai kekayaan bersih.

APBN adalah instrumen keuangan negara yang mengatur penerimaan dan pengeluaran untuk mendukung pemerintahan, pembangunan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas, serta menetapkan arah dan prioritas pembangunan. Fungsinya mencakup otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam tahun anggaran, APBN harus berisi semua penerimaan, pengeluaran, dan kewajiban negara.

Penyusunan dan Penetapan APBN sebagai berikut:

1. APBN adalah struktur pengelolaan keuangan negara ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang.
2. APBN meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
3. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan nonpajak, dan hibah.
4. Dana negara digunakan untuk menjalankan tugas pemerintahan pusat serta mendukung perimbangan keuangan pusat dan daerah.
5. Belanja negara disusun berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
6. Setiap Agustus, pemerintah pusat mengajukan RUU APBN beserta nota keuangan dan dokumen pendukung kepada DPR.
7. Pembahasan RUU APBN mengikuti ketentuan undang-undang mengenai susunan dan kedudukan DPR.
8. DPR dapat mengusulkan perubahan dalam RUU APBN, baik terkait penerimaan maupun pengeluaran.
9. Keputusan DPR mengenai RUU APBN harus ditetapkan paling lambat dua bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
10. APBN yang disahkan DPR memuat struktur organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
11. Jika DPR tidak menyetujui RUU APBN, pemerintah pusat diperbolehkan menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya.

### ***Laporan Realisasi Anggaran***

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjelaskan penggunaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan membandingkan rencana anggaran dan hasil nyata dalam satu periode (Majampoh & Datu, 2021; Palilingan et al., 2021). Laporan Realisasi Anggaran secara langsung memuat pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dikembalikan.
- b. Pendapatan (basis akrual) merupakan hak pemerintah yang menambah nilai kekayaan bersih.
- c. Belanja (basis kas) mencakup seluruh pengeluaran Bendahara Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam tahun anggaran berjalan dan tidak ditagih kembali.
- d. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang mengurangi kekayaan bersih.
- e. Transfer mencakup aliran dana, termasuk dana perimbangan dan bagi hasil, dari satu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
- f. Pembiayaan adalah penerimaan yang harus dikembalikan dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun berikutnya, yang bertujuan menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

- g. Sumber pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan penggunaannya antara lain untuk pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman ke entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis yang menjelaskan topik yang ditemukan melalui pengamatan dan wawancara di lapangan. Dalam Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2010, analisis belanja barang dan jasa dilakukan. Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif tersebut meliputi struktur organisasi dan wawancara tentang proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian lain-lain pendapatan yang sah dikelolah oleh Pengadilan Negeri Tondano yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Analisis Kualitatif Deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Data yang analisis akan kumpulkan dengan melalui wawancara dan observasi lapangan, keumudian akan proses analisis data

1. Tahap Pertama

Peneliti mengumpulkan data dan informasi terkait perlakuan akuntansi belanja barang dan jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Tondano.

2. Tahap Kedua

Data Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menilai apakah perlakuan akuntansinya pada pencatatan tahun 2023 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

3. Tahap Ketiga

Berdasarkan hasil analisis, data pencatatan realisasi anggaran dibandingkan dengan ketentuan dalam PP No. 71 Tahun 2010, yang sejalan dengan kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Hal ini bertujuan memastikan bahwa akuntansi dan pelaporan keuangan dilaksanakan sesuai prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik yang berlaku dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi yang diterapkan.

## **HASIL PENELITIAN**

### ***Perlakuan Akuntansi atas Belanja Barang dan Jasa pada Pengadilan Negeri Tondano***

1. Pencatatan belanja barang dan jasa

Dari hasil wawancara di Pengadilan Negeri Tondano, belanja dicatat saat pengeluaran dilakukan melalui rekening kas umum oleh bendahara dan dipertanggungjawabkan oleh unit terkait. Pendapatan diakui ketika diterima di rekening kas umum atau oleh entitas pelaporan. Dalam akuntansi, pengakuan berarti mencatat suatu peristiwa keuangan yang memenuhi kriteria agar masuk sebagai bagian dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, atau pembiayaan dalam laporan keuangan. Proses ini diwujudkan dengan mencatat jumlah uang pada pos laporan keuangan yang terpengaruh.

2. Pengukuran

Hasil wawancara di Pengadilan Negeri Tondano menunjukkan bahwa seluruh laporan keuangan disajikan dalam rupiah, sementara transaksi dalam mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu sebelum dilaporkan. Dalam akuntansi belanja, jumlah uang yang digunakan entitas dicatat untuk menilai aset, kewajiban, pendapatan, dan tanggung jawab keuangan. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, pengukuran adalah proses menentukan nilai uang untuk setiap pos dalam laporan keuangan, di mana perhitungan umumnya menggunakan nilai perolehan. Aset dicatat sebesar total pengeluaran kas, setara kas, atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan. Selain itu, menurut informan, pengadilan negeri menerapkan metode value for money dalam menilai kinerja, yang berfokus pada tiga aspek utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, guna memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

3. Pengungkapan

Berdasarkan wawancara di Pengadilan Negeri Tondano, tahap akhir pencatatan akuntansi adalah pengungkapan laporan keuangan. Di pengadilan tersebut, proses pengungkapan tidak mengalami kendala karena pencatatan dilakukan otomatis melalui aplikasi resmi, dengan rincian setiap pos transaksi. Laporan keuangan belanja juga diunggah setiap bulan di website resmi pengadilan agar mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.

### ***Jurnal Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional***

1. Pencatatan belanja barang dan jasa

Belanja dicatat oleh pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi dan dicatat dengan dua entri, yang menghasilkan LRA.

**Tabel 1. Jurnal Pencatatan Belanja**

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
2/2/2012	5...	Belanja	xxx	
	3...	Estimasi perubahan SAL		xxx

*Sumber: Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah, Tahun*

2. Pencatatan beban jurnal

Laporan Operasional (LO) serta Neraca Pemerintah Daerah disusun dengan metode pencatatan dua entri. Sebagai contoh, berikut adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat beban dalam buku jurnal finansial melalui mekanisme pembayaran GU/TU di Pengadilan:

**Tabel 2. Jurnal Pencatatan Beban**

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debit	Kredit
7/10/2012	9...	Beban ....	xxx	
	1...	Kas di Bend.pengeluaran		xxx
	1...	Kas di bendahara pengeluaran	xxx	
	3...	RK-PPKD		xxx

*Sumber: Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah, Tahun*

**Jurnal LRA Pengadilan Negeri Tondano**

Pencatatan LRA pada Pengadilan Negeri Tondano adalah sebagai berikut

**Tabel 3. Jurnal LRA**

No	Jenis Belanja	Debit	Kredit
1	Belanja Peralatan operasional dan non operasional Perubahan SAL	106.990.000	106.990.000
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Perubahan SAL	4.171.211.000	4.171.211.000
3	Belanja Kebutuhan Sehari-hari perkantoran Perubahan SAL	320.508.000	320.508.000
4	Belanja Layanan Daya dan jasa Perubahan SAL	182.701.000	182.701.000
5	Belanja Pemeliharaan kantor Perubahan SAL	461.352.000	461.352.000
6	Belanja Koordinasi rapat internal barang operasional Perubahan SAL	4.440.000	4.440.000
7	Belanja seluruh perjalanan dinas pengadilan Perubahan SAL	16.450.000	16.450.000
8	Belanja perjalanan dinas Konsultasi ketingkat banding	4.000.000	

	Perubahan SAL		4.000.000
9	Belanja Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Perubahan SAL	141.135.000	141.135.000
10	Belanja bahan prasarana pendukung disabilitas Perubahan SAL	72.705.000	72.705.000
11	Belanja barang persediaan Pendaftaran berkas perkara Perubahan SAL	43.200.000	43.200.000
12	Belanja seluruh Pengiriman surat pengadilan Perubahan SAL	41.750.000	41.750.000
13	Belanja bahan Pemeriksaan di sidang Pengadilan Perubahan SAL	19.450.000	19.450.000
14	Belanja Bahan minutasasi/upaya Hukum Perubahan SAL	5.750.000	5.750.000
15	Belanja jasa konsultan Layanan bantuan hukum perseorangan Perubahan SAL	16.800.000	16.800.000
16	Belanja yang dikeluarkan untuk kasus peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan perkara Perubahan SAL	670.000	670.000
17	Belanja bahan dan perjalanan Biaya Eksekusi Perubahan SAL	2.000	2.000

*Sumber: Data Olahan, 2023*

Pendapatan-LRA diakui saat uang diterima di Rekening Kas Umum Negara atau Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran diakui saat pertanggungjawaban atas pengeluaran disahkan oleh unit perbendaharaan.

*Jurnal LO Pengadilan Negeri Tondano*

Pencatatan jurnal realisasi anggaran Pengadilan Negeri Tondano adalah sebagai berikut

**Tabel 4. Jurnal Laporan Operasional**

No	Jenis belanja	Debit	Kredit
1	Beban Peralatan operasional dan non operasional Kas	106.990.000	106.990.000
2	Beban Gaji dan Tunjangan Kas	4.171.211.000	4.171.211.000
3	Beban Kebutuhan Sehari-hari perkantoran Kas	320.508.000	320.508.000
4	Beban Layanan Daya dan jasa Kas	182.701.000	182.701.000
5	Beban Pemeliharaan kantor Kas	461.352.000	461.352.000
6	Beban Koordinasi rapat internal barang operasional Kas	4.440.000	4.440.000
7	Beban seluruh perjalanan dinas pengadilan Kas	16.450.000	16.450.000
8	Beban perjalanan dinas Konsultasi ketingkat banding Kas	4.000.000	4.000.000
9	Beban Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Kas	141.135.000	141.135.000
10	Beban bahan prasarana pendukung disabilitas Kas	72.705.000	72.705.000
11	Beban barang persediaan Pendaftaran berkas perkara Kas	43.200.000	43.200.000
12	Beban seluruh Pengiriman surat pengadilan Kas	41.750.000	41.750.000
13	Beban bahan Pemeriksaan di sidang Pengadilan Kas	19.450.000	19.450.000
14	Beban Belanja Bahan minutasi/upaya Hukum Kas	5.750.000	5.750.000
15	Beban jasa konsultan Layanan bantuan hukum perseorangan	16.800.000	

	Kas		16.800.000
16	Beban Biaya perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan perkara Kas	670.000	670.000
17	Beban bahan dan perjalanan Biaya Eksekusi Kas	2.000	2.000

Sumber: Data olahan, 2023)

Pencatatan beban dilakukan dengan sistem ganda untuk menyusun Laporan Operasional (LO). Beban diakui saat muncul kewajiban, yaitu ketika ada hak dari pihak lain kepada pengadilan meskipun kas belum dibayarkan. Contohnya tagihan telepon dan listrik yang masih belum dibayar.

**Kebijakan Perlakuan Akuntansi Tentang Pencatatan Anggaran Belanja pada Pengadilan Negeri Tondano**

Berikut pokok-pokok rincian dan perbandingan anggaran Belanja barang dan jasa yang di anggarkan pada Pengadilan Negeri Tondano tahun 2023.

**Tabel 5. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa**

n o	Jenis belanja	Anggaran	realisasi	presentas e	Sisa dana
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi					
1	Dukungan Manajemen non operasional satker daerah	9.664.000	9.658.200	99,94%	5.800
2	Gaji dan Tunjangan	4.171.211.000	3.758.628.303	90,11%	412.582.697
3	Kebutuhan Sehari-hari perkantoran	320.508.000	312.492.788	97,50%	8.015.212
4	Layanan Daya dan jasa	182.701.000	181.796.618	99,50%	904.382
5	Pemeliharaan kantor	461.352.000	461.338.033	99,98%	13.967
6	Pembayaran Terkait pelaksanaan operasional kantor	97.326.000	73.852.498	75,88%	23.473.502
7	Koordinasi rapat internal	4.440.000	4.439.000	99,98%	1.000
8	Konsultasi/koordinasi	3.500.000	3.490.000	99,71%	10.000
9	Konsultasi keningkat banding	4.000.000	4.000.000	100,00%	0
Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan mahkama agung					
10	Pengadaan peralatan fasilitas	141.135.000	141.125.000	99,99%	10.000

	perkantoran				
Program penegakan dan pelayanan hukum					
11	Dukungan untuk menyelesaikan masalah	1.500.000	1.500.000	100,00%	0
12	Pendaftaran berkas perkara	43.200.000	43.199.575	99,99%	425
13	Penetapan hari sidang	11.450.000	11.400.000	99,56%	50.000
14	Pengiriman surat penahanan dan perpanjang penahanan	11.000.000	10.973.000	99,75%	27.000
15	Pengiriman salinan atau petikan putusan kepada Terdakwa dan JPU	15.300.000	15,263,960	99,76%	36.040
16	Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama	9.600.000	9.295.000	89,99%	305.000
17	Penanganan dan peninjauan kembali perkara kasasi di pengadilan tingkat pertama	5.850.000	4.724.840	80,77%	1.125.000
18	Layanan bantuan hukum perseorangan	16.800.000	16.800.000	100,00%	0
19	Biaya yang terkait dengan perkara peradilan umum yang diselesaikan dengan pembebasan perkara	670.000	667.000	99,55%	3.000
20	Biaya eksekusi	2.000	0	0,00%	2.000

Sumber: Data Olahan, 2023

Realisasi pengeluaran barang dan jasa sesuai dengan anggaran pengeluaran barang dan jasa dari pengadilan negeri manado kurang lebih dana yang terpakai dari anggaran APBN dikarenakan dalam bulan tertentu anggaran mengalami perubahan dikarenakan kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja. untuk pengadilan negeri Tondano sebesar 98% dari keseluruhan pagu dipa yang di tentukan.

### ***Mekanisme Perlakuan Akuntansi Atas Anggaran Belanja pada Pengadilan Negeri Tondano***

Untuk memastikan bahwa mekanisme perlakuan akuntansi terhadap belanja modal sesuai dengan standar yang ditetapkan, dapat dievaluasi dari proses, sistem, dan prosedur penatausahaan pengeluaran kas yang diterapkan di instansi tersebut. Dalam Wawancara di Pengadilan Negeri Tondano Kepala staff umum dan staffnya mengatakan pengadilan negeri Tondano saat ini laporan keuangan disusun menggunakan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja pemerintah untuk mengelola keuangan.

### **PEMBAHASAN**

#### ***Penerapan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Jasa pada Pengadilan Negeri Tondano***

Perlakuan akuntansi pada Proses penyusunan Laporan anggaran dan Laporan operasional belanja barang dan jasa telah di laksanakan sesuai dengan aturan yang ada dengan berlandaskan peraturan pemerintah tentang perlakuan akuntansi, Penguploadan laporan realisasi anggaran dilakukan setiap bulan dan kemudian diakumulasikan pada akhir periode akuntansi. Ini dilakukan untuk menjaga anggaran yang sudah ditetapkan sebaik mungkin. Pada akhir periode akuntansi, SilPa (sisa lebih pembiayaan anggaran) dan SiKpa (sisa kurang pembiayaan anggaran) ditransfer ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Belanja di Pengadilan Negeri Tondano berjalan dengan baik karena melibatkan orang-orang yang ahli di bidang keuangan dan operator yang akrab dengan situs web resmi pengadilan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Sistem penginputan Laporan Realisasi sudah menggunakan 1 sistem dalam webside resmi Pengadilan negeri Tondano, sehingga dinilai sudah efisien dan terbuka, untuk penginputan Laporan realisasi anggaran dalam wawancara dengan kepala sub bidang keuangan beserta staffnya mengatakan tidak ada kendala dalam menjalankan sistem penginputan dan sudah sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintahan.

#### ***Mekanisme Perlakuan Akuntansi Atas Anggaran Belanja pada Pengadilan Negeri Tondano***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan belanja barang di Pengadilan Negeri Tondano sudah sesuai standar dengan menggunakan aplikasi SAKTI. Aplikasi ini dipakai oleh satuan kerja kementerian dan lembaga untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan negara (SPAN). Melalui SAKTI, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dapat dilakukan secara elektronik dengan database tunggal (Karmila et al., 2021). Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pengadilan negeri Tondano sejalan dengan standar akuntansi Pemerintahan mengenai anggaran belanja yang terbuka untuk publik dan menggunakan aplikasi keuangan Sesuai standar kementerian dan pemerintahan (Pengadilan Agama Tondano, 2023).

***Kesesuaian Perlakuan Akuntansi pada Pengadilan Negeri Tondano dengan Aturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010***

Berikut ini tabel perbandingan mengenai perlakuan akuntansi belanja barang dan jasa pada pengadilan negeri Tondano dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010.

**Tabel 6. Perbandingan Perlakuan Akuntansi pada Pengadilan Negeri Tondano dengan PP No 71 Tahun 2010**

Perbandingan penerapan PP No 71 Tahun 2010 dengan Pengadilan negeri Tondano		
PP NOMOR 71 TAHUN 2010	Pengadilan Negeri Tondano	Keterangan
<b>PENGAKUAN</b> Dalam akuntansi pengakuan ditunjukkan dengan mencatat jumlah uang pada pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa yang terkait, yang memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur atau diprediksi dengan andal.	Dalam tabel Laporan realisasi anggaran terdapat pos-pos laporan keuangan pada pengadilan negeri Tondano contohnya pos kebutuhan sehari-hari kantor, Pemeliharaan kantor, layanan daya dan jasa, dan pos-pos lainnya yang sudah di rincikan dalam laporan keuangan.	Sesuai
<b>PENGUKURAN</b> - Dalam akuntansi, pengukuran berarti penulisan satuan mata uang dan jumlah dalam laporan keuangan. Semua pos dicatat dalam rupiah, sedangkan transaksi mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu ke rupiah.	-Dalam laporan keuangan pengadilan negeri todano semuanya sudah menggunakan pencatatan mata uang rupiah.	sesuai
- Pos-pos dalam laporan keuangan diukur berdasarkan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan atau nilai wajar imbalan yang diberikan untuk memperolehnya, sedangkan kewajiban dicatat sebesar sumber daya ekonomi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memenuhinya.	-Nilai perolehan historis adalah konsep akuntansi untuk menentukan bagaimana perusahaan mencatat biaya pada saat mereka mencapai tujuan tertentu dan tentunya pengadilan negeri tondano selalu mencatat dan otomatis terinput dalam sistem keuangan mengenai kewajiban biaya yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perkantoran.	sesuai

<b>PENGUNGKAPAN</b> Seluruh informasi yang dibutuhkan pengguna disajikan dalam laporan keuangan, baik melalui catatan maupun lembar utama laporan. Bentuk pengungkapan tiap pos dapat berbeda, misalnya terkait kepentingan pemerintah pada perusahaan milik negara atau daerah.	Keterbukaan laporan keuangan dan informasi yang lengkap untuk para pengguna sudah di realisasikan oleh pengadilan negeri Tondano dalam keterbukaan atas laporan realisasi belanja pada webside resmi pengadilan dan memudahkan pengguna atau pihak yang berkepentingan untuk menganalisis jumlah anggaran yang di realisasikan pengadilan negeri Tondano setiap tahunnya.	sesuai
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

*Sumber: Data Olahan, 2023*

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi pada Laporan Realisasi Anggaran belanja barang dan jasa di Pengadilan Negeri Tondano telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
2. Laporan Realisasi Belanja disusun oleh pihak yang berkompeten dan menunjukkan anggaran yang terealisasi secara tepat sasaran, khususnya dalam pengalokasian sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pengadilan Negeri Tondano juga menyediakan Laporan Realisasi Anggaran Belanja melalui website resmi, sebagai wujud transparansi dan keterbukaan agar masyarakat dapat mengakses informasi anggaran yang digunakan sesuai dengan ketentuan PP No. 71 Tahun 2010.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih jauh tentang Perlakuan akuntansi belanja barang dan jasa pada Pengadilan Negeri Tondano

## **REFERENCES**

- Albab, M. U. (2020). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59262>.
- Anwar, S., Amalia, H. Z., & Melani, F. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan dan Beban pada Perusahaan E-Commerce. *Karimah Tauhid*, 2(2), 380–393. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i2.8358>.

- Baso, Bintari, S., & Sumarni. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). *Economics and Digital Business Review*, 1(1), 58–74. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.6>.
- Febrianka, M. A. (2023). Evaluasi Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal (Studi Kasus Elemen Laporan Keuangan Dan Laporan Realisasi Anggaran). *POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA*. <http://eprints.poltektegal.ac.id/2399>.
- Harahap, S. A. R., & Nasution, J. (2022). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 Tahun 2010 terhadap Belanja Penanganan Covid-19. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 10(1), 23. <https://doi.org/10.25157/je.v10i1.7403>.
- Karmila, D., Tinangon, J. J., & Gamaliel, H. (2021). Analysis of accounting treatment on capital expenditure in dinas pariwisata provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 9(1), 668–678. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32453>.
- Kojongian, C., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Pelaporan Belanja Barang Dan Jasa Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara. 13(3), 581–585. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20739.2018>.
- Majampoh, W. T., & Datu, C. (2021). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(2), 1731–1741. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/35961>.
- Palilingan, K., Manossoh, H., & Mawikere, L. (2021). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 462–468. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/30901>.
- Pengadilan Agama Tondano. (2023). Laporan Realisasi Anggaran 2023. <https://pn-tondano.go.id>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Putri, A. S. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Barang, Belanja Modal dan Inflasi terhadap Utang Negara Periode Tahun 2004-2019.
- Sari, P., & Baku, A. (2022). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 395–406. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2014>.

- Syaiful. (2006). Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi*, 1-12. <https://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf>.
- Utami, L. I. (2017). Pengaruh belanja modal, pengangguran terbuka dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 6(1). <https://doi.org/10.22437/jels.v6i1.4180>.
- Yusuf, B. (2015). Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah. [https://www.academia.edu/12230862/Modul\\_Akuntansi\\_Keuangan\\_pemerintah](https://www.academia.edu/12230862/Modul_Akuntansi_Keuangan_pemerintah).